

DPR MINTA KEMENDAGRI

Larang Kepala Daerah Angkat Timses Jadi Honorer

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, walikota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Dede Yusuf, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama, sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

"Sebagaimana kita ketahui Pilkada Langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang siapa pun calon

terpilih, atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau PPPK," kata Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, ia pun mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar menggelar seleksi gelombang kedua untuk menampung peserta seleksi PPPK yang belum lolos.

Pasalnya, ia menyebut masih terdapat permasalahan terkait seleksi tersebut. Menurut Dede Yusuf, hal itu menjadi penting untuk mencegah potensi adanya timses yang tiba-tiba menjadi pegawai Pemerintah.

Menurut Dede Yusuf, masih banyak honorer atau PPPK yang kebingungan soal formasi penempatannya. Karena banyak yang mengira formasi tersebut harus linier dengan bidang keahlian berdasarkan pendidikannya.

"Nah sementara konsep kita saat ini adalah siapa pun yang sudah bekerja, mengajar, apalagi dulu kami memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk database di sistem," katanya.

Ia pun mendorong agar seleksi gelombang kedua itu dilaksanakan pada Maret atau April 2025. Menurutnya, seleksi gelombang kedua itu bisa menjadi perpanjangan dari proses yang sudah selesai pada Desember 2024.

(Ant/San)-d

HM AGUS NUGROHO LP

Pimpin LGNOTA Demak 2025-2030



KR-Istimewa

Sekda Kabupaten Demak H Akhmad Sugiharto melantik Pengurus LGNOTA Kabupaten Demak periode 2025-2030.

DEMAK (KR) - Drs HM Agus Nugroho LP resmi memimpin Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGNOTA) Kabupaten Demak, Pensiunan Asisten 2 Sekda Kabupaten Demak itu menggantikan Hj Eni Susiani SE, untuk masa bakti 2025-2030.

Pelantikan oleh Sekda H Akhmad Sugiharto ST MT mewakili Bupati Demak dr Hj Eisti'nah SE dilakukan Senin (30/12). Turut hadir mewakili Ketua LGNOTA Provinsi Jateng Nasukha. Ditetapkan sebagai Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Hj Eni Susiani, Hj Nur Aeni dan H Amir Mahmud, Sekretaris 1 dan 2 Muh Ridhodhin SH MH dan Nurul Prasetyani ST MT, sedangkan Bendahara 1 dan 2 Drs H Agus Musyafak dan Retno Widyastuti SSTP.

Membacakan sambutan Bupati Demak, Sekda Akhmad Sugiharto menyampaikan,

masa depan anak khususnya dari keluarga kurang mampu harus menjadi perhatian bersama. Mengingat peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Diharapkan kepengurusan LGNOTA yang baru bisa berinovasi dalam merumuskan program kerja. Termasuk menciptakan program yang relevan dengan kebutuhan anak asuh. Seperti peningkatan literasi digital, keterampilan hidup dan kesehatan mental.

Diucapkan pula terima kasih kepada Pengurus LGNOTA 2019-2024. "Matur nuwun sudah bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Sehingga kinerja LGNOTA Kabupaten Demak menjadi yang terbaik di Jateng," ujarnya didampingi Bidang Humas Agung Hidayanto SSos MSI. (*)-d

Kuota

"Jumlah (petugas haji) hanya 2.210 dinilai belum mencapai tahap ideal, mengingat jemaah haji yang harus dilayani 221.000 orang. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya agar mendapatkan tambahan kuota petugas sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," ujar Menag.

Pada haji 2024, Indonesia mendapat kuota jemaah haji setelah mendapatkan kuota tambahan sebesar 241.000. Sedangkan petugas haji sebesar 4.421 orang. Jumlah itu didapat setelah pemerintah menerima tambahan kuota jemaah dan petugas haji dari Pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, Badan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas.

"Salah satu yang penting, kita meli-

batkan banyak pihak untuk memastikan, pelaksanaan haji sesuai koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala BP Haji Mohammad Irfan Yusuf di Kantor Kemenag.

Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik.

"Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang diluar PHU selama ini, akan semakin melengkapi tugas kita, sehingga menjadi lebih baik," ucapnya.

Ia menegaskan, BP Haji mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan beberapa mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi serta individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan yang kini resmi bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut.

Ia berharap dengan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, pelayanan haji dapat berjalan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.

Terkait pelantikan pejabat eselon I, Irfan mengemukakan, hal tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan yang dilakukan tersebut juga memiliki ciri khas unik, yakni seluruh pejabat mengenakan pakaian formal berupa jas dan sarung sebagai simbol kesederhanaan ala pesantren.

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Prabowo

beberapa hari terakhir mengarah kepada vonis ringan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah.

Majelis hakim saat membacakan putusannya minggu lalu (23/12) menyatakan Harvey bersalah dan menghukum dia penjara 6 tahun 6 bulan, sementara tuntutan jaksa 12

tahun. Dalam pembacaan putusan, majelis hakim juga mengakui Harvey dan terdakwa lainnya bersalah merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Polda

Salah satunya, orangtua selalu membandingkan nilai akademis anak dengan orang lain, sehingga anak merasa termarjinalkan. Dalam kondisi tersebut, anak kemudian mencari pelarian dan akhirnya direkrut menjadi anggota geng tertentu. "Padahal prestasi anak tidak hanya diukur dari sisi akademik, namun juga dalam berbagai hal seperti olahraga dan kesenian," ucap Suwondo.

Dalam paparannya, Kapolda juga menyebutkan keberhasilan jajarannya dalam mengungkap sejumlah perkara menonjol. Antara lain, penyalahgunaan narkoba sehingga berhasil menyelamatkan 3.194.732 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polda juga berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi, pertambangan ile-

gal, tindak pidana migas hingga kasus pencurian dengan kekerasan. Pada pengujung tahun 2024, Polda DIY dengan stakeholder juga telah menutup sejumlah outlet miras, baik yang sudah berizin maupun ilegal.

"Jumlah miras yang kami sita sebanyak 18.944 botol untuk miras pabrikan, sedangkan untuk non-pabrikan sebanyak 2.633 botol ditambah 286 liter miras. Outlet yang ditutup terus kita pantau dan pascapenutupan kita juga mengantisipasi modus baru peredaran miras," tegas Suwondo.

Di sisi lain, Kapolda juga mengungkap terkait naiknya peristiwa laka lantas. Dimana pada tahun sebelumnya, terjadi 6.211 kasus laka lantas, sedangkan tahun 2024 menjadi 6.517 kasus dengan korban jiwa 393 orang

dan luka berat 6 orang.

Kapolda mengapresiasi masyarakat yang mulai mengenal layanan emergency call 110. Dimana sepanjang tahun 2024, penggunaan layanan 110 sebanyak 134.640 kali dengan rincian miscall sebanyak 11.433 kali, panggilan ditangani sebanyak 105.213 kali dan panggilan ditangani (panggilan berdering lebih dari 10 detik) sebanyak 17.994 kali.

"Sejak tahun 2022 kami upayakan agar layanan 110 ini lebih membumi dan kini mulai dikenal masyarakat. Meskipun sejauh ini, panggilan lebih menanyakan seputar informasi seperti layanan membuat SIM, padahal 110 ini untuk emergency call, tapi tidak apa-apa," ujar Kapolda.

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

PPN

akan tetapi pelan-pelan baru mulai bergerak, sehingga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya sudah harus menerima beban dengan naiknya ppn tersebut.

Pemerintah dalam hal ini memang membutuhkan asupan untuk membangun bangsa, namun harus lebih jeli untuk menaikkan ppn menjadi 12%, mungkin sektor-sektor 'berkelas' yang lebih utama diberlakukan kenaikan 12%. Sektor-sektor IT yang berkembang sangat masif, kegiatan impor yang juga semakin pesat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kelas 'kakap', mungkin akan lebih mengena.

Kenaikan ppn 12% ini tentu sangat berpengaruh pula terhadap pelaku industri pariwisata. Apapun usahanya tentu akan mengalami kenaikan akibat

hal tersebut dan akan berimbas terhadap keberlangsungan industri pariwisata. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena daya beli masyarakat yang menurun. Ibaratnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan semakin sulit apalagi untuk berwisata dengan berbagai macam kebutuhannya. Kenaikan ppn 11% yang sebelumnya masih sangat berdampak bagi industri jasa wisata, apalagi saat ini diwacanakan kenaikan menjadi 12%. Dampak dari hal ini mungkin masyarakat akan semakin melemah daya juang, daya saing, dan daya beli.

Bila ditengok, saat ini sangat banyak bisnis-bisnis wisata yang belum bangkit dari keterpurukan pandemi covid 19 beberapa waktu lalu.

Kini masyarakat dihadapkan pada bayangan jelas akan adanya inflasi, akan adanya kenaikan barang-barang terutama kebutuhan sehari-hari, dan hal ini akan memicu masyarakat semakin merasakan irisan hati untuk bertahan hidup dalam tatanan lebih sejahtera.

Semoga pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan tersebut karena bagaimanapun semua akan berdampak kepada masyarakat kurang mampu. Semoga kesenjangan antar masyarakat ataupun jurang tidak semakin dalam, dan semoga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan sesuai cita-cita bangsa saat ini. Salam !!

(Penulis adalah Dosen Stipram Yogyakarta, pemerhati pariwisata)-d

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

Helena

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup utang pengganti.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan vonis mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa Helena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun hal meringankan, terdakwa Helena belum pernah dihukum. Selain itu, merupakan tulang punggung di keluarga, berlaku sopan, dan menyesali perbuatannya.

Vonis pidana yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Helena dengan hukuman selama delapan tahun penjara. Selain itu dituntut pidana denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp 210 miliar subsider empat tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi timah.

Dalam kasus itu, Helena didakwa membantu

terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 420 miliar. Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga didakwa melakukan TPPU atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar Rp 900 juta, dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.

Sementara itu, Dirut PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani divonis pidana penjara selama delapan tahun karena terbukti korupsi terkait kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022. Selain pidana penjara, Mochtar juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

MKD

provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen," demikian isi surat panggilan sidang yang ditandatangani Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam tertanggal 27 Desember 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi, MKD DPR RI kemudian memanggil Rieke Diah Pitaloka dalam sidang MKD DPR RI dengan agenda meminta keterangan teradu pada hari Senin pukul 11.00 WIB di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI," tulisnya.

Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/12), untuk meminta pembatalan wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025. "Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden RI

7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.

Untuk itu, Rieke menilai keputusan naik tidaknya PPN harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca		Selasa, 31 Desember 2024				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Slleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-29	65-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	22-30	65-95

Sumber: Bala Indonesia, Sumber: Multi Authorized Money Changer, Telp. (0274) 547888, KR-JSR/SV, Grafik: Aiko

Widiyanti Kurnianingsih, SE Makt AKCA CRA
Ka Prodi Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

Sustainability UMKM Era Digitalisasi

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

masih mengganggu. Selain itu UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah.

Di masa sekarang ini kerasnya persaingan bisnis mengakibatkan UMKM harus bekerja keras dalam persaingan pasar. Munculnya persaingan pasar mulai dari industri kecil, menengah, bahkan sampai ke skala besar adalah salah satu masalah yang kita tidak dapat hindari. Oleh karena itu, kesiapan UMKM dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis harus disiapkan dari sekarang, salah satunya dengan meningkatkan kesiapan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan pajak sangat

ditentukan oleh bekal pengetahuan yang dimiliki dan seberapa besar kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM menurut (Rachmawati, Ramayanti, dan Setiawan, 2021).

Pengukuran keunggulan bersaing bagi UMKM mempunyai indikator-indikator khusus. Indikator tersebut meliputi kualitas pelayanan yang terdiri dari (tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy), indikator diferensiasi yang terdiri dari (tampilan aplikasi, fitur dan layanan aplikasi, kemampuan manajemen, dan bonafiditas perusahaan), dan indikator kualitas hubungan mitra yang terdiri dari (kelancaran komunikasi, dan kerjasama saling menguntungkan). Dalam meningkatkan keunggulan bersaing UMKM bukan hanya memerlukan pemahaman indikator-indikator dalam keunggulan bersaing saja. Namun, UMKM juga memerlukan strategi-strategi yang baik, seperti menggunakan strategi sustainability.

Strategi Sustainability menurut

(Mulya 2017) sustainable business adalah bisnis yang memastikan bahwa seluruh aktivitas dan proses produksinya mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan, dan tetap memperoleh keuntungan. Untuk menggunakan strategi sustainability diperlukan pengukuran kinerja dari sebuah usaha. Pengukuran kinerja biasanya hanya mengukur kinerja keuangan saja, padahal pengukuran kinerja terbagi menjadi 2, yaitu kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan.

Pengukuran kinerja keuangan adalah keberhasilan anggota, tim, atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dengan perilaku yang diharapkan.

Sedangkan pengukuran kinerja nonkeuangan adalah merupakan alat dari sebuah organisasi untuk melihat apakah proses yang telah dijalankan dapat mewujudkan tujuan keseluruhan yang telah ditetapkan termasuk tujuan keuangan.

Strategi Sustainability yang perlu

dilakukan antara lain:

- Perspektif Keuangan
UMKM saat ini masih belum sepenuhnya mementingkan kegunaan dari laporan keuangan usaha, sehingga pelaku UMKM tidak tahu pasti berapa keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya.
- Perspektif Pelanggan
Perspektif pelanggan merupakan kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, hubungan yang baik dengan pelanggan baik internal maupun eksternal, dan kemampuan dalam mempertahankan pelanggan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- Perspektif Proses Bisnis
UMKM harus mampu mengubah cara bisnisnya dari cara konvensional dalam beroperasi, di mana interaksi langsung antara penjual dan pembeli mulai beralih ke ranah digital. Karena bisnis digital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lebih mudah dan cepat
- Perspektif Pembelajaran (SDM)
UMKM dapat melakukan pelatihan kepada karyawannya untuk memenuhi keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan proses usaha. Kemudian juga melakukan evaluasi terhadap karyawan, bisa dilakukan evaluasi bisa setiap hari atau setiap bulan. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap konsumen.

Keunggulan Bersaing:

- Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan merupakan penilaian konsumen tentang layanan dari pelaku usaha sesuai dengan yang diharapkan.
- Diferensiasi
Diferensiasi merupakan sebuah strategi yang memanfaatkan berbagai industri seperti memanfaatkan teknologi dalam

membuat UMKM menjadi diketahui banyak orang dan membuat unik sebuah usahanya.

3. Kualitas Hubungan Mitra
Bentuk kerjasama dengan platform yang tersedia seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood. Komunikasi yang lancar dengan platform sangat penting dalam menghubungkan UMKM dengan platform ini. Dengan komunikasi yang lancar dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan platform-platform. Kerjasama dengan platform dapat menguntungkan pelaku usaha apalagi banyak voucher yang sering ditawarkan platform cukup menarik bagi konsumen.

Semoga upaya ini dapat dilakukan agar usaha yang dikelola dapat tetap berjalan dengan diimbangi peningkatan keunggulan dalam produk agar memiliki potensi daya saing.***